



## INTERNALISASI NILAI NILAI ANTIKORUPSI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN

Zainudin Hasan <sup>1</sup>, M. Reyhan Al Rizkie Sumbahan <sup>2</sup>, Agam Izazi <sup>3</sup>, M. Rakha Wira Yudha <sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail: [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id) , [reyhanalrizkie.05@gmail.com](mailto:reyhanalrizkie.05@gmail.com) , [agam.agam122006@gmail.com](mailto:agam.agam122006@gmail.com) ,  
[mrakhawirayudha@gmail.com](mailto:mrakhawirayudha@gmail.com)

**Abstrak..** Korupsi merupakan permasalahan serius yang telah mengakar dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia serta memberikan dampak luas terhadap kerugian negara dan degradasi moral masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum yang bersifat represif, tetapi juga memerlukan langkah preventif yang berkelanjutan melalui sektor pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini guna membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan sebagai upaya pencegahan korupsi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum mampu menanamkan sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan integritas pada peserta didik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dan budaya sekolah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis, terstruktur, dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam dunia pendidikan sehingga mampu menciptakan generasi yang berintegritas dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di masa depan.

**Kata kunci :** Korupsi; Pendidikan antikorupsi; Internalisasi nilai; Kurikulum pendidikan; Integritas; Karakter; Pencegahan korupsi.

**Abstract..** Corruption is a serious problem that has become deeply rooted in Indonesia's social, economic, and political systems, causing significant financial losses to the state and contributing to moral degradation in society. Efforts to eradicate corruption cannot rely solely on repressive legal approaches but must also involve sustainable preventive measures through the education sector. Education plays a strategic role in instilling anti-corruption values from an early age to shape a generation with strong character and integrity. This study aims to examine the internalization of anti-corruption values within the educational curriculum as an effort to prevent corruption. The method used is a literature review by analyzing various relevant books and scientific journals. The results show that the integration of anti-corruption values into the curriculum can foster honesty, responsibility, discipline, and integrity among students. However, its implementation still faces several challenges, such as limited teacher understanding, inadequate facilities, and insufficient policy and school culture support. Therefore, systematic, structured, and collaborative strategies among the government, educational institutions, and society are required to optimize the internalization of anti-corruption values in education, thereby creating a generation with integrity that actively contributes to corruption prevention in the future.

**Keywords :** Corruption; Anti-corruption education; Value internalization; Educational curriculum; Integrity; Character building; Corruption prevention

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan relasi kekuasaan di Indonesia, sehingga berdampak luas terhadap pembangunan nasional serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi

negara<sup>1</sup>. Praktik korupsi bahkan telah berkembang menjadi kebiasaan sosial yang sulit diberantas karena adanya toleransi masyarakat serta lemahnya internalisasi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari<sup>2</sup>. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum yang bersifat represif, melainkan perlu didukung oleh pendekatan preventif melalui pendidikan yang mampu membentuk karakter generasi muda<sup>3</sup>. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas agar individu memiliki kesadaran moral untuk menolak segala bentuk praktik korupsi sejak dini.<sup>4</sup>

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan relasi kekuasaan di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam praktiknya, korupsi sering kali melibatkan berbagai aktor dan jaringan yang terstruktur, sehingga menjadikannya sebagai permasalahan yang sulit diberantas secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi persoalan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara komprehensif.

Lebih lanjut, praktik korupsi di Indonesia dalam beberapa kasus telah berkembang menjadi kebiasaan sosial yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya toleransi sosial terhadap tindakan koruptif, baik dalam skala kecil maupun besar. Selain itu, lemahnya internalisasi nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari turut memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya tercela, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang sulit dihindari<sup>5</sup>.

Selama ini, upaya pemberantasan korupsi lebih banyak difokuskan pada pendekatan hukum yang bersifat represif, seperti penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Meskipun pendekatan ini penting, namun belum cukup efektif untuk mengatasi akar permasalahan korupsi yang bersifat sistemik dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih menyentuh aspek fundamental, yaitu melalui pendekatan preventif yang berfokus pada pembentukan karakter dan kesadaran individu. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun generasi yang berintegritas dan berkarakter kuat. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dapat ditanamkan secara berkelanjutan dalam diri individu<sup>6</sup>. Dengan demikian, diharapkan terbentuk kesadaran moral yang mampu mendorong individu untuk menolak segala bentuk praktik korupsi.

<sup>1</sup> Arliman, L. (2017). Konsep dan gagasan pendidikan antikorupsi bagi anak. *Nurani: Jurnal Kajian Syaria'ah dan Masyarakat*, 17(1), 49–64

<sup>2</sup> Eliezar, D. (2020). Pendidikan antikorupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 66–72.

<sup>3</sup> Hasan, Z. (2023). Rendahnya moralitas dan profesionalisme penegak hukum. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 828–831.

<sup>4</sup> Hasan, Z. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. UBL Press.

<sup>5</sup> Hasan, Z. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. CV. Alinea Edumedia.

<sup>6</sup> Hasan, Z., Wijaya, B., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas antikorupsi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.

Implementasi pendidikan antikorupsi tidak hanya terbatas pada kurikulum formal, tetapi juga perlu didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif agar nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber buku dan jurnal ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi**

Internalisasi nilai-nilai antikorupsi merupakan suatu proses yang bersifat sistematis dan berkelanjutan dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam diri individu sehingga nilai tersebut tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dihayati dan diwujudkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan karena internalisasi nilai tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang mencerminkan integritas dan etika. Dalam hal ini, internalisasi nilai antikorupsi bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki kesadaran moral yang tinggi, mampu membedakan antara perilaku yang benar dan salah, serta memiliki komitmen untuk menolak segala bentuk praktik korupsi dalam berbagai situasi kehidupan.<sup>7</sup>

Nilai-nilai antikorupsi yang diinternalisasikan mencakup berbagai aspek fundamental seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kedisiplinan, keberanian, serta kepedulian terhadap kepentingan umum. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individu, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan berintegritas. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini harus diajarkan secara konsisten dan berulang agar dapat membentuk kebiasaan yang melekat dalam diri individu. Apabila nilai-nilai tersebut tidak ditanamkan secara kuat sejak dini, maka individu akan lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan yang permisif terhadap korupsi, sehingga berpotensi melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan etika.<sup>8</sup>

Proses internalisasi nilai tidak dapat terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang panjang dan berkesinambungan, mulai dari tahap pengenalan nilai, pemahaman makna nilai, penghayatan secara emosional, hingga penerapan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks pendidikan, tahapan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, analisis kasus, simulasi, serta pembiasaan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mengalami proses pembelajaran yang bersifat reflektif dan aplikatif, sehingga nilai-nilai tersebut dapat tertanam secara lebih mendalam.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Khairudin, Hasan, Z., Malik, & Dharmawan, Y. Y. (2025). Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia. Ganesha Kreasi Semesta.

<sup>8</sup> Kristiono, N. (2018). Penanaman karakter antikorupsi melalui pendidikan. *Hibualamo: Seri Ilmu Sosial dan Kependidikan*, 2(2), 51–56.

<sup>9</sup> Salistina, D. (2015). Pendidikan antikorupsi melalui hidden curriculum. *Jurnal Ta'allum*, 3(2), 163–184.

Selain faktor pendidikan formal, keberhasilan internalisasi nilai antikorupsi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, termasuk keluarga dan masyarakat. Lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab akan memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan karakter individu. Demikian pula dengan lingkungan masyarakat yang mendukung nilai-nilai integritas akan memperkuat proses internalisasi yang telah dilakukan di sekolah. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap praktik korupsi justru akan melemahkan nilai-nilai yang telah ditanamkan, sehingga individu mengalami konflik nilai dalam kehidupannya<sup>10</sup>.

Dalam perspektif yang lebih luas, internalisasi nilai antikorupsi tidak hanya berorientasi pada pembentukan individu yang berintegritas, tetapi juga pada pembentukan budaya antikorupsi dalam masyarakat. Budaya ini akan terbentuk apabila nilai-nilai antikorupsi telah menjadi bagian dari norma sosial yang dipegang oleh masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, internalisasi nilai antikorupsi merupakan langkah strategis dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, di mana masyarakat secara sadar menolak segala bentuk praktik korupsi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta transparansi<sup>11</sup>.

### **Peran Pendidikan dalam Membentuk Karakter Antikorupsi**

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter individu, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang menjadi dasar dalam membangun perilaku yang berintegritas. Melalui proses pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi menjadi instrumen penting dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran kritis terhadap bahaya korupsi serta memiliki komitmen untuk menolak praktik tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai dampak negatif korupsi, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan integritas dan etika. Dengan demikian, pendidikan berperan dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara seimbang. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya mengetahui apa itu korupsi, tetapi juga memahami mengapa korupsi harus ditolak dan bagaimana cara mencegahnya dalam kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter yang kuat dan berintegritas.

Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan dalam materi pembelajaran pada mata pelajaran tertentu, sedangkan secara implisit dapat ditanamkan melalui budaya sekolah dan interaksi sosial antara peserta didik dan tenaga pendidik. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk memahami nilai-nilai antikorupsi secara kontekstual dan aplikatif, sehingga lebih mudah untuk diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Peran guru sebagai pendidik sekaligus teladan juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi,

<sup>10</sup> Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan sejak dini. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 5475–5483.

<sup>11</sup> Sumaryati. (2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif esensialisme. *Jurnal Antikorupsi Indonesia*, 2(1), 1–10.

tetapi juga harus mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan yang diberikan oleh guru akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik, karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat secara langsung. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai antikorupsi. Lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab akan membantu peserta didik dalam mengembangkan karakter yang berintegritas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu menciptakan generasi yang bebas dari korupsi.

### **Tantangan Implementasi Pendidikan Antikorupsi**

Implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional, yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama adalah budaya permisif terhadap korupsi yang masih berkembang dalam masyarakat. Budaya ini menyebabkan praktik korupsi sering dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan dapat diterima dalam kondisi tertentu. Akibatnya, upaya internalisasi nilai-nilai antikorupsi menjadi kurang efektif karena adanya ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dan realitas yang terjadi di masyarakat.<sup>12</sup>

Selain faktor budaya, kurangnya integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan juga menjadi hambatan yang signifikan. Dalam banyak kasus, pendidikan antikorupsi masih dipandang sebagai materi tambahan yang tidak memiliki kedudukan yang sama dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini menyebabkan nilai-nilai antikorupsi tidak diajarkan secara mendalam dan sistematis, sehingga peserta didik tidak memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan.<sup>13</sup> Tantangan lainnya adalah kurangnya keteladanan dari lingkungan sosial, termasuk dari figur publik dan aparat pemerintah. Ketika peserta didik melihat adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pejabat publik, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan melemahkan kepercayaan mereka terhadap nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat proses internalisasi nilai dan menyebabkan peserta didik mengalami konflik nilai dalam kehidupannya.

Perkembangan teknologi dan informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Akses informasi yang luas dan tidak terbatas dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda, terutama jika informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang seharusnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan berbagai tantangan tersebut, implementasi pendidikan antikorupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, sehingga nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan secara efektif dan konsisten dalam kehidupan individu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Putri, A. (2021). Integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 120–130.

<sup>13</sup> Wibowo, A. (2022). Pendidikan karakter berbasis antikorupsi di sekolah. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 5(1), 45–55.

<sup>14</sup> Rahmawati, D. (2021). Peran sekolah dalam pendidikan antikorupsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 88–97.

### **Strategi Integrasi Nilai Antikorupsi dalam Kurikulum**

Strategi integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter ini harus menjadi bagian integral dari kurikulum, sehingga tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi inti dari proses pembelajaran.

Pendekatan pembelajaran yang inovatif juga menjadi strategi penting dalam mengintegrasikan nilai antikorupsi. Metode seperti pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan diskusi kelompok memungkinkan peserta didik untuk memahami nilai-nilai tersebut secara lebih mendalam dan aplikatif. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan *hidden curriculum* juga merupakan strategi yang efektif dalam internalisasi nilai antikorupsi. *Hidden curriculum* mencakup nilai-nilai yang ditanamkan melalui budaya sekolah, interaksi sosial, dan kebiasaan sehari-hari. Lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab akan membantu peserta didik dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut secara alami tanpa harus melalui pembelajaran formal.<sup>15</sup>

Peningkatan kompetensi guru juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan integrasi nilai antikorupsi. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep antikorupsi serta mampu mengembangkan metode pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka dapat menjalankan perannya secara optimal. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan integrasi nilai antikorupsi. Lingkungan yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai tersebut akan memperkuat proses internalisasi dan membentuk karakter individu yang berintegritas. Dengan demikian, strategi yang komprehensif dan kolaboratif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi yang bebas dari korupsi.

### **KESIMPULAN**

Internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi secara jangka panjang melalui pendekatan preventif yang berfokus pada pembentukan karakter individu. Proses internalisasi ini tidak hanya mencakup pemahaman konsep, tetapi juga penghayatan dan penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter antikorupsi melalui integrasi nilai dalam kurikulum, keteladanan guru, serta budaya sekolah yang mendukung.

Meskipun demikian, implementasi pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya permisif terhadap korupsi, kurangnya integrasi kurikulum, lemahnya keteladanan, serta pengaruh perkembangan teknologi dan

---

<sup>15</sup> Hidayat, M. (2022). Implementasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 7(1), 33–42.

informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan melalui penguatan pendidikan karakter, inovasi metode pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai antikorupsi diharapkan mampu menciptakan generasi yang berintegritas dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arliman, L. (2017). Konsep dan gagasan pendidikan antikorupsi bagi anak. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(1), 49–64.
- Eliezar, D. (2020). Pendidikan antikorupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 66–72.
- Hasan, Z. (2023). Rendahnya moralitas dan profesionalisme penegak hukum. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 828–831.
- Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. UBL Press.
- Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Wijaya, B., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas antikorupsi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.
- Khairudin, Hasan, Z., Malik, & Dharmawan, Y. Y. (2025). Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia. Ganesha Kreasi Semesta.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman karakter antikorupsi melalui pendidikan. *Hibualamo: Seri Ilmu Sosial dan Kependidikan*, 2(2), 51–56.
- Salistina, D. (2015). Pendidikan antikorupsi melalui hidden curriculum. *Jurnal Ta'allum*, 3(2), 163–184.
- Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan sejak dini. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 5475–5483.
- Sumaryati. (2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif esensialisme. *Jurnal Antikorupsi Indonesia*, 2(1), 1–10.
- Putri, A. (2021). Integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 120–130.
- Wibowo, A. (2022). Pendidikan karakter berbasis antikorupsi di sekolah. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 5(1), 45–55.
- Rahmawati, D. (2021). Peran sekolah dalam pendidikan antikorupsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 88–97.
- Hidayat, M. (2022). Implementasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 7(1), 33–42.